Modul Pelaksanaan Anggaran

Ekosistem Tata Kelola & Anatomi Pejabat Perbendaharaan

Panduan Visual Pelaksanaan APBN Tingkat Satuan Kerja

Direktorat Jenderal Perbendaharaan | Kementerian Keuangan RI

NotebookLM

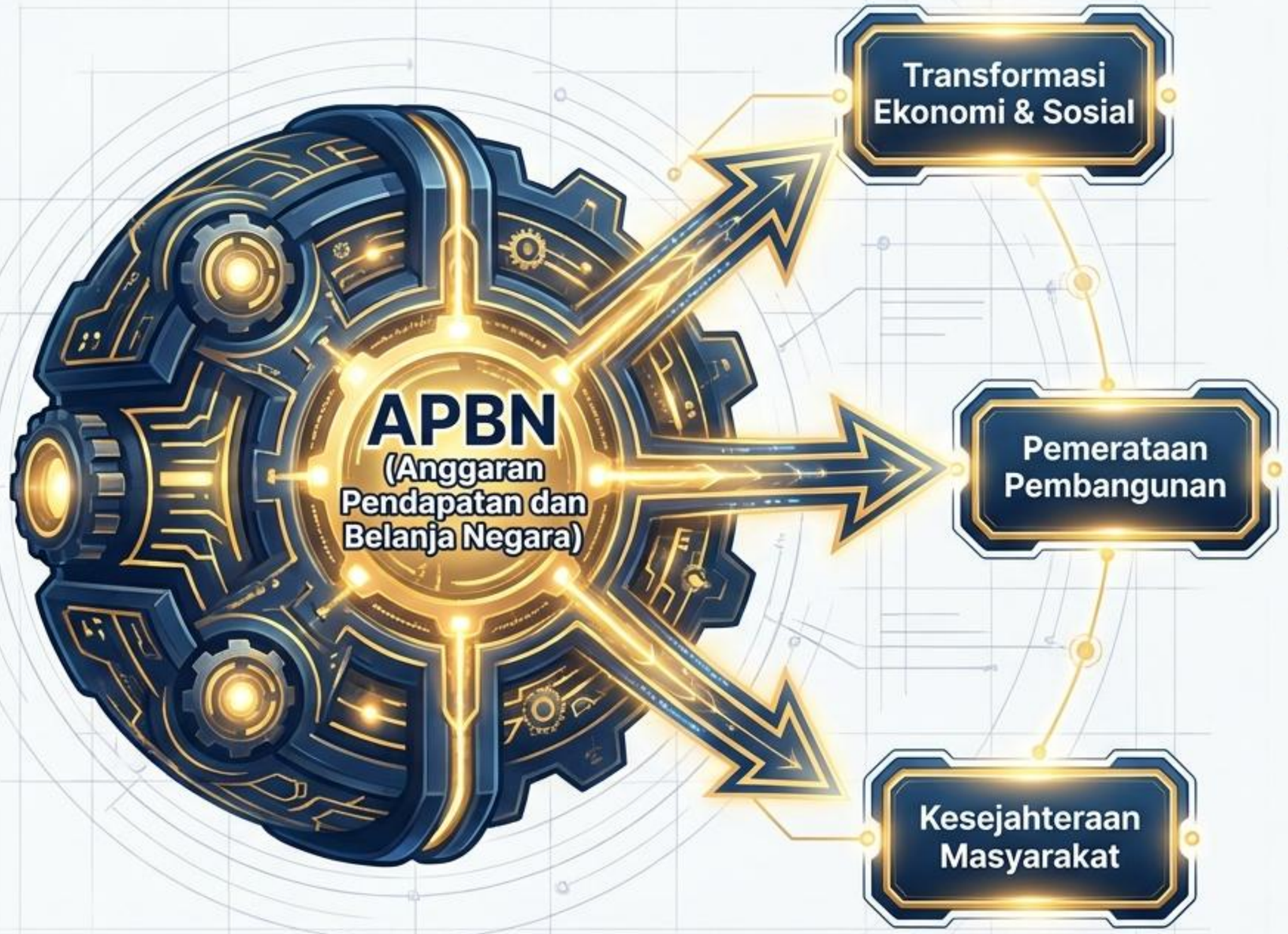

Filosofi Spending Better

Pelaksanaan APBN bukan sekadar membelanjakan uang, melainkan memastikan belanja yang produktif, berdampak, dan terarah.

Setiap rupiah harus dikelola secara akuntabel, efisien, efektif, dan transparan sesuai amanat konstitusi.

NotebookLM

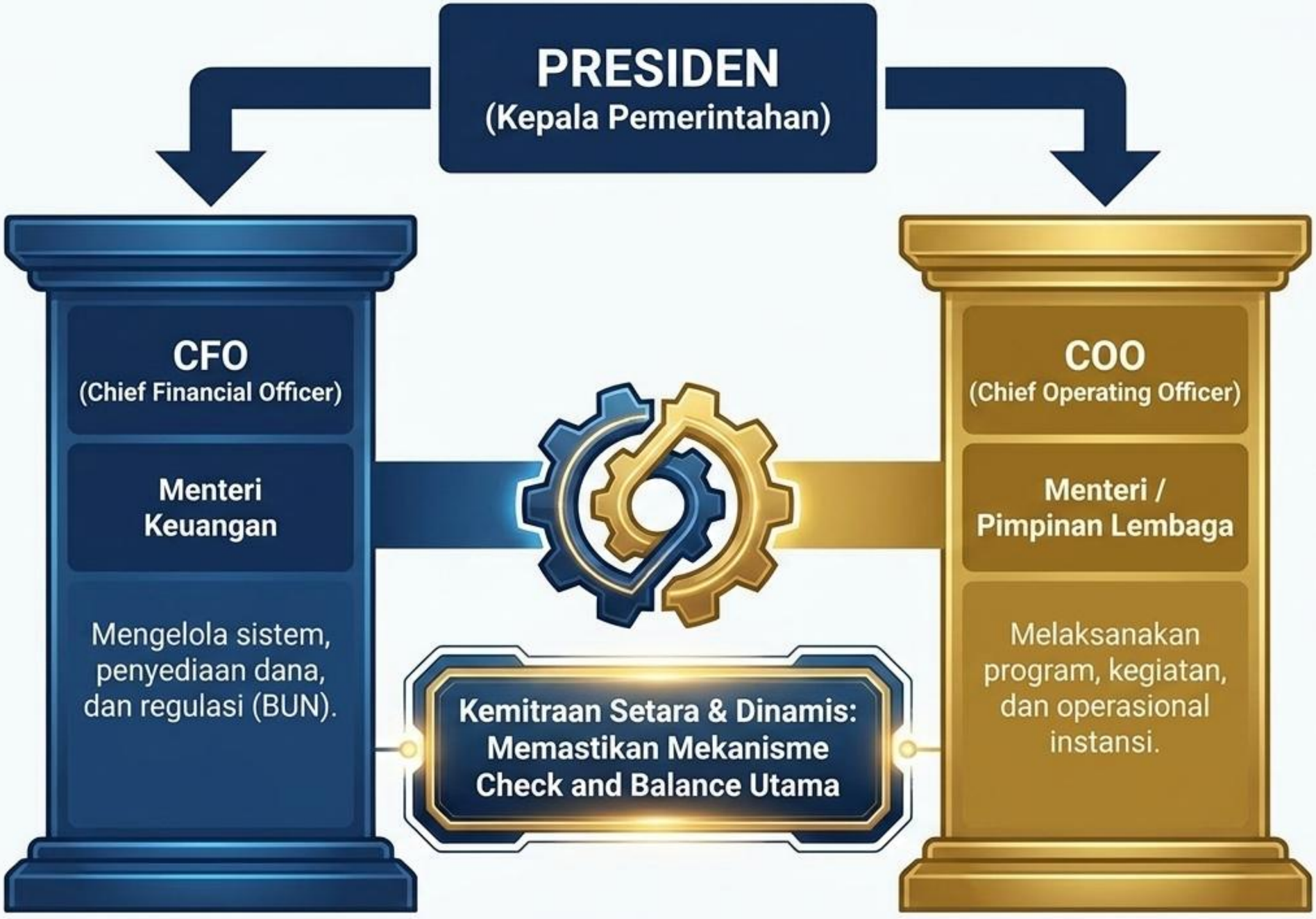
PRESIDEN
(Kepala Pemerintahan)
CFO
(Chief Financial Officer)
Menteri Keuangan
Mengelola sistem, penyediaan dana, dan regulasi (BUN).
COO
(Chief Operating Officer)
Menteri / Pimpinan Lembaga
Melaksanakan program, kegiatan, dan operasional instansi.
Kemitraan Setara & Dinamis: Memastikan Mekanisme Check and Balance Utama

NotebookLM

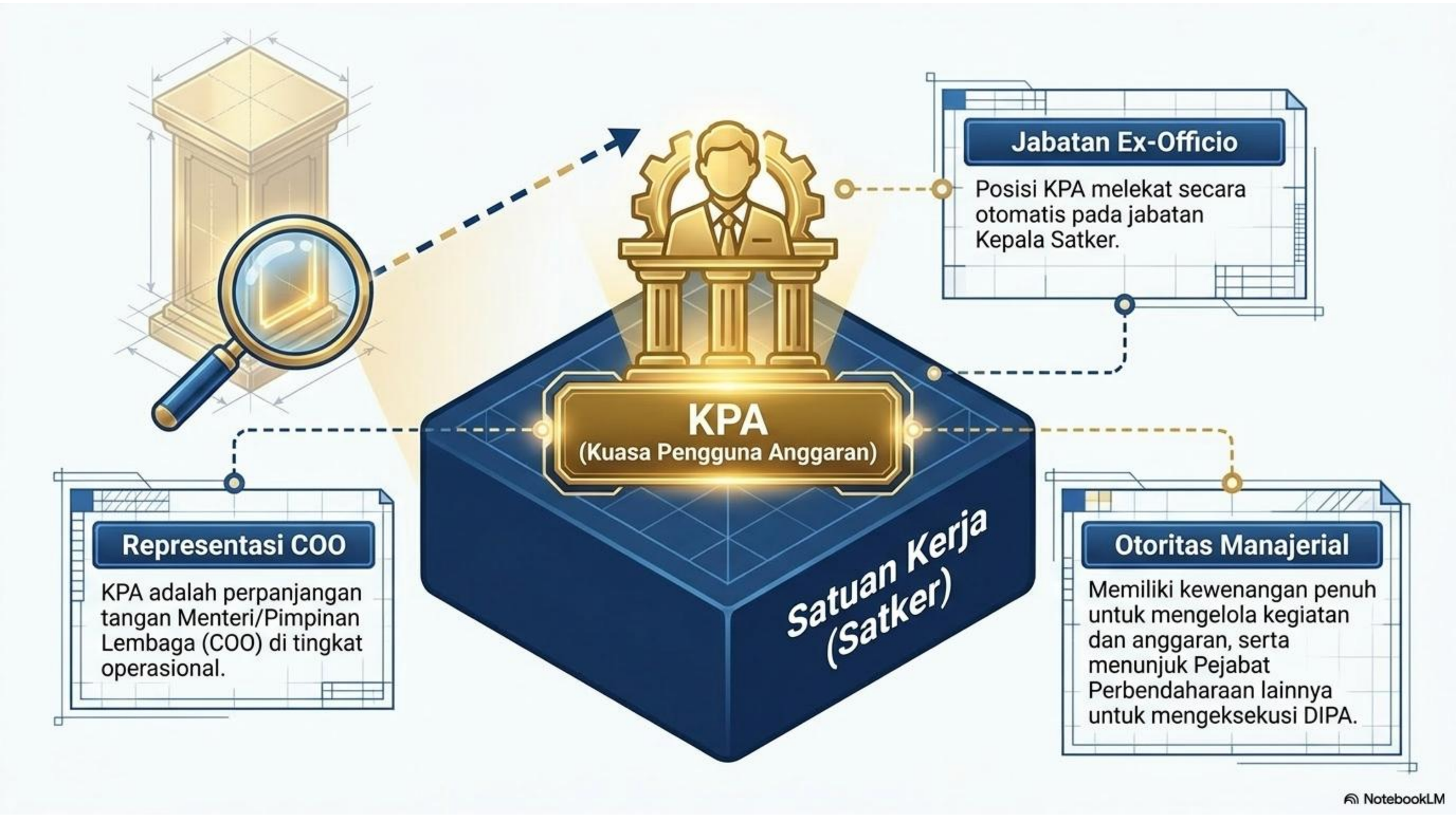
Jabatan Ex-Officio
Posisi KPA melekat secara otomatis pada jabatan Kepala Satker.
KPA
(Kuasa Pengguna Anggaran)
Satuan Kerja (Satker)
Representasi COO
KPA adalah perpanjangan tangan Menteri/Pimpinan Lembaga (COO) di tingkat operasional.
Otoritas Manajerial
Memiliki kewenangan penuh untuk mengelola kegiatan dan anggaran, serta menunjuk Pejabat Perbendaharaan lainnya untuk mengeksekusi DIPA.

NotebookLM

Stage 1

Eksekusi

PPK

Batas Pemisahan Kewenangan

Stage 2

Validasi & Pengujian

PPSPM

Batas Pemisahan Kewenangan

Stage 3

Pembayaran & Kas

Bendahara

Prinsip Check and Balance

Kekuasaan tidak boleh terpusat. PPK, PPSPM, dan Bendahara **saling menguji (saling uji)** pada setiap tahapan siklus anggaran untuk mencegah fraud (kecurangan) dan meminimalisir kesalahan.

NotebookLM

Anatomi Tripartit Pejabat Perbendaharaan

	PPK	PPSPM	Bendahara
Metafora Peran	**Sang Eksekutor**	**Sang Validator**	**Sang Kasir**
Tugas Inti	Mengambil tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran.	Melakukan **validasi**, **otorisasi**, dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).	Menerima, menyimpan, membayarkan, dan menatausahakan uang persediaan.
Output Utama	Komitmen & Kontrak Pengadaan	Penerbitan SPM	Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) & Kas
Aturan Jumlah	Satu atau lebih per DIPA.	Hanya SATU per DIPA.	Ditetapkan per Satker (bisa lintas tahun anggaran).

NotebookLM

KPA: Sang Manajer

Kuasa Pengguna Anggaran

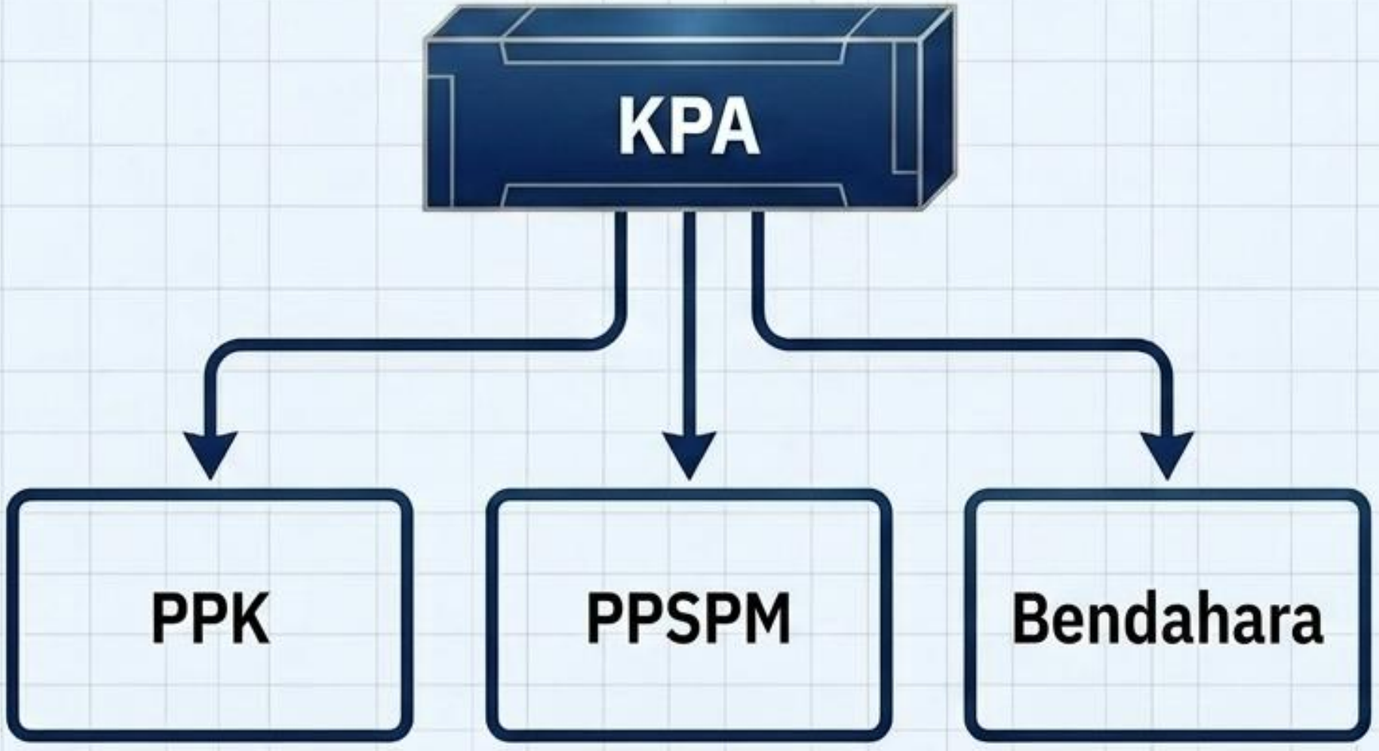

Sifat Jabatan

- Ex-Officio (Melekat pada Kepala Satker).

Fungsi Utama

Penanggung jawab tertinggi tingkat operasional (Satker).

Kewenangan Delegasi

Menetapkan PPK dan PPSPM sesuai dengan kebutuhan kinerja dan beban kerja Satuan Kerja.

NotebookLM

PPK: Sang Eksekutor

Pejabat Pembuat Komitmen

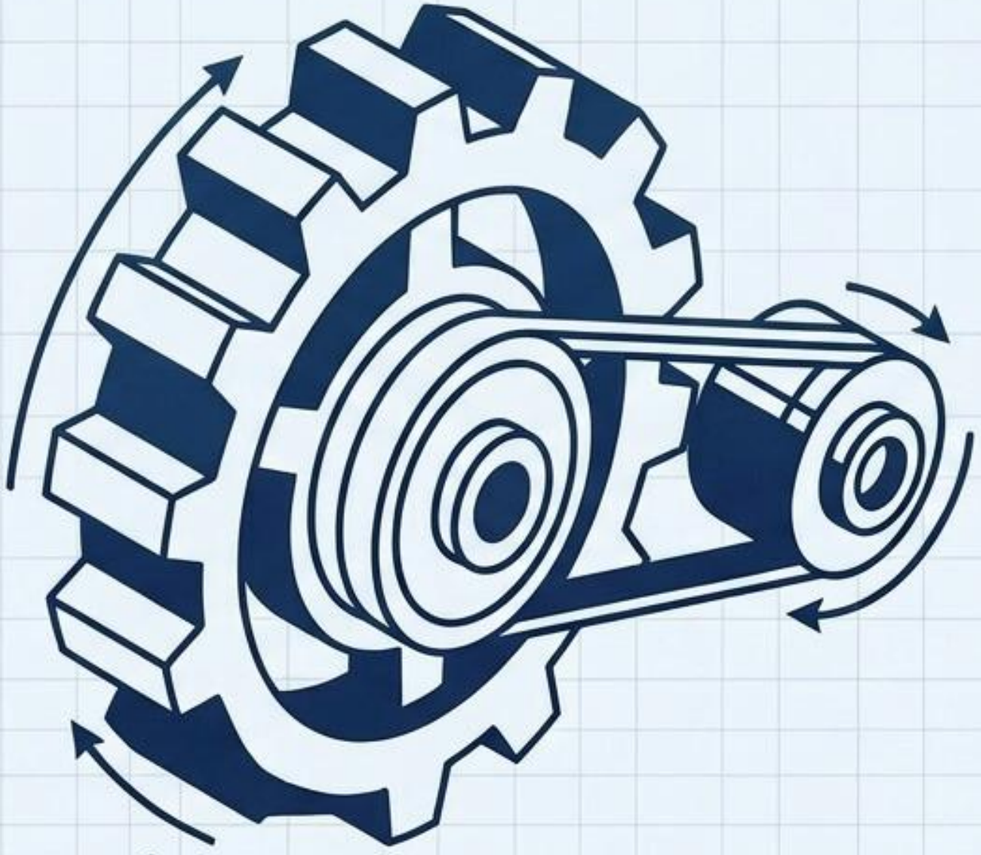

Tindakan Kunci

Melakukan perikatan/kontrak dengan pihak ketiga (Supplier).

Pemicu Anggaran

Setiap keputusan PPK secara langsung mengakibatkan pengeluaran dari APBN.

Fleksibilitas Struktur

KPA dapat menetapkan satu atau lebih PPK dalam satu DIPA, sangat bergantung pada kompleksitas dan volume beban kerja Satker.

NotebookLM

PPSPM: Sang Validator

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar

Fungsi Pengujian

Menerima tagihan dari PPK, lalu melakukan pengujian kebenaran materiil dan formal.

Otorisasi Akhir

Jika valid, PPSPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk dicairkan oleh negara.

Pembatasan Ketat

Untuk menjaga fokus dan independensi validasi, hanya boleh ada SATU PPSPM untuk setiap DIPA.

NotebookLM

Bendahara: Sang Kasir

Pengelola Kas Negara di Tingkat Satker

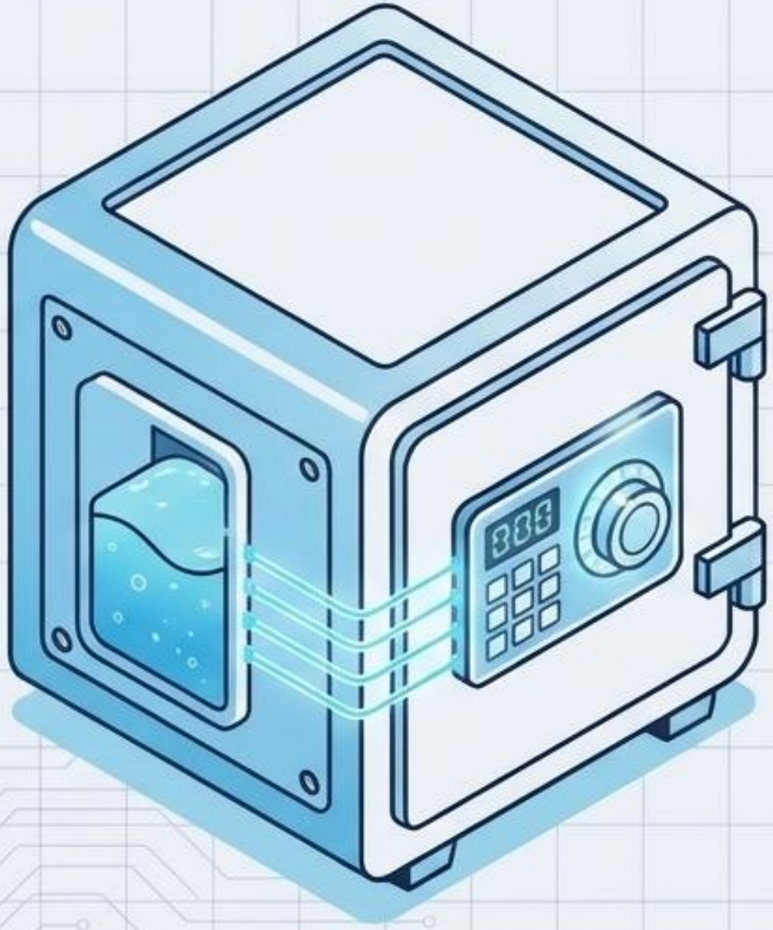

Ruang Lingkup

Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan kas.

Status Pengangkatan

Diangkat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga (COO), namun kewenangannya dapat didelegasikan kepada Kepala Satker.

Kontinuitas

Penetapan SK tidak terikat tahun anggaran. Berlaku terus menerus hingga ada pergantian pejabat baru.

NotebookLM

Fondasi Integritas: Sertifikasi Kompetensi

Jabatan Perbendaharaan wajib diisi oleh aparatur yang teruji dan bersertifikat demi menjaga standar pengelolaan Keuangan Negara.

Penunjukan pejabat oleh KPA harus memprioritaskan aparatur yang telah memiliki sertifikat **Standar Kompetensi Teknis** ini.

NotebookLM

Sintesis: Bagaimana Peran Mikro Mewujudkan Visi Makro

Kualitas Belanja
(*Spending Better*) &
Pembangunan Nasional
- APBN yang berdampak
maksimal.
Kepemimpinan KPA & Sinergi CFO-COO
- Tata kelola manajerial yang terarah.
Tripartit Satker (PPK, PPSPM, Bendahara)
- Menjalankan *Check & Balance* (Mekanisme Saling Uji).
Sertifikasi & Kompetensi (PNT, SNT, BNT)
- Memastikan keahlian.

Keberhasilan triliunan rupiah APBN dalam menyejahterakan rakyat tidak ditentukan semata oleh besaran angkanya, melainkan bertumpu sepenuhnya pada integritas, kompetensi, dan disiplin pemisahan tugas di tingkat Satuan Kerja.

NotebookLM